



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 40 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap nilai perolehan air tanah di wilayah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CATA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

**Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2024 tentang Tata Cita Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 116) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Juli 2025**

**BUPATI SIAK,**

**AFNI. Z**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Juli 2025**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**FAUZI ASNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 40**

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

| NO | VOLUME<br>PENGAMBILAN<br>AIR TANAH<br>(M3) | KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                            | Kelompok<br>1                                 | Kelompok<br>2 | Kelompok<br>3 | Kelompok<br>4 | Kelompok<br>5 |
| 1  | 0 - 50                                     | 14.562                                        | 13.680        | 12.797        | 11.915        | 11.032        |
| 2  | 51 - 500                                   | 16.548                                        | 15.224        | 13.900        | 12.576        | 11.253        |
| 3  | 501 - 1.000                                | 19.527                                        | 17.541        | 15.555        | 13.569        | 11.584        |
| 4  | 1.001 - 2.500                              | 23.997                                        | 21.018        | 18.039        | 15.061        | 12.082        |
| 5  | >2.500                                     | 30.695                                        | 26.230        | 21.759        | 17.294        | 12.824        |

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

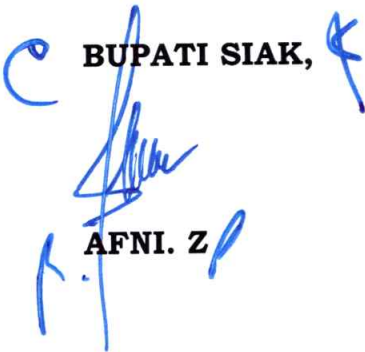
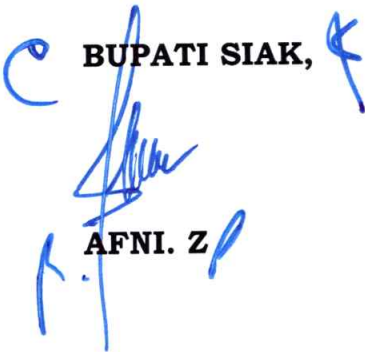
| NO | VOLUME<br>PENGAMBILAN<br>AIR TANAH<br>(M3) | KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                            | Kelompok<br>1                                 | Kelompok<br>2 | Kelompok<br>3 | Kelompok<br>4 | Kelompok<br>5 |
| 1  | 0 - 50                                     | 9.929                                         | 9.046         | 8.164         | 7.281         | 6.399         |
| 2  | 51 - 500                                   | 11.915                                        | 10.591        | 9.267         | 7.943         | 6.619         |
| 3  | 501 - 1.000                                | 14.893                                        | 12.907        | 10.922        | 8.936         | 6.950         |
| 4  | 1.001 - 2.500                              | 19.363                                        | 16.385        | 13.406        | 10.427        | 7.449         |
| 5  | >2.500                                     | 26.062                                        | 21.596        | 17.126        | 12.660        | 8.190         |

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

| NO | VOLUME<br>PENGAMBILAN<br>AIR TANAH<br>(M3) | KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                            | Kelompok<br>1                                 | Kelompok<br>2 | Kelompok<br>3 | Kelompok<br>4 | Kelompok<br>5 |
| 1  | 0 - 50                                     | 6.619                                         | 5.737         | 4.854         | 3.972         | 3.089         |
| 2  | 51 - 500                                   | 8.605                                         | 7.281         | 5.957         | 4.633         | 3.310         |
| 3  | 501 - 1.000                                | 11.584                                        | 9.598         | 7.612         | 5.626         | 3.641         |
| 4  | 1.001 - 2.500                              | 16.054                                        | 13.075        | 10.096        | 7.118         | 4.139         |
| 5  | >2.500                                     | 22.752                                        | 18.287        | 13.816        | 9.351         | 4.881         |

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

| NO | VOLUME<br>PENGAMBILAN<br>AIR TANAH<br>(M3) | KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                            | Kelompok<br>1                                 | Kelompok<br>2 | Kelompok<br>3 | Kelompok<br>4 | Kelompok<br>5 |
| 1  | 0 - 50                                     | 4.633                                         | 3.751         | 2.868         | 1.986         | 1.103         |
| 2  | 51 - 500                                   | 6.619                                         | 5.295         | 3.972         | 2.648         | 1.324         |
| 3  | 501 - 1.000                                | 9.598                                         | 7.612         | 5.626         | 3.641         | 1.655         |
| 4  | 1.001 - 2.500                              | 14.068                                        | 11.089        | 8.111         | 5.132         | 2.153         |
| 5  | >2.500                                     | 20.767                                        | 16.301        | 11.831        | 7.365         | 2.895         |

 **BUPATI SIAK,**  
 **AFNI. Z**

**Lampiran II : Peraturan Bupati Siak**

**Nomor : 40 Tahun 2025**

**Tanggal : 21 Juli 2025**

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH**

**AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF**

|            |                                |                                      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Contoh I   | : Kelompok 1                   | = Pengambilan Air Tanah > 2.500      |
|            | Volume pengambilan Air Tanah   | = 2.600 M3                           |
|            | Nilai Perolehan Air Tanah      | = Rp. 30.695,-                       |
|            | Tarif Pajak Air Tanah          | = 20 %                               |
|            | Besar Pajak Air Tanah Terutang | = VPAT x NPAT x Tarif PAT            |
|            |                                | = 2.600 M3 x Rp. 30.695,- x 20%      |
|            |                                | = Rp. 15.961.400,-                   |
| Contoh II  | : Kelompok 2                   | = Pengambilan Air Tanah 1.001- 2.500 |
|            | Volume pengambilan Air Tanah   | = 1.500 M3                           |
|            | Nilai Perolehan Air Tanah      | = Rp. 21.018,-                       |
|            | Tarif Pajak Air Tanah          | = 20 %                               |
|            | Besar Pajak Air Tanah Terutang | = VPAT x NPAT x Tarif PAT            |
|            |                                | = 1.500 M3 x Rp. 21.018,- x 20%      |
|            |                                | = Rp. 6.305.400,-                    |
| Contoh III | : Kelompok 3                   | = Pengambilan Air Tanah 501-1.000    |
|            | Volume pengambilan Air Tanah   | = 700 M3                             |
|            | Nilai Perolehan Air Tanah      | = Rp. 15.555,-                       |
|            | Tarif Pajak Air Tanah          | = 20 %                               |
|            | Besar Pajak Air Tanah Terutang | = VPAT x NPAT x Tarif PAT            |
|            |                                | = 700 M3 x Rp. 15.555,- x 20%        |
|            |                                | = Rp. 2.177.700,-                    |
| Contoh IV  | : Kelompok 4                   | = Pengambilan Air Tanah 51-500       |
|            | Volume pengambilan Air Tanah   | = 400 M3                             |
|            | Nilai Perolehan Air Tanah      | = Rp. 12.576,-                       |
|            | Tarif Pajak Air Tanah          | = 20 %                               |
|            | Besar Pajak Air Tanah Terutang | = VPAT x NPAT x Tarif PAT            |
|            |                                | = 400 M3 x Rp. 12.576,- x 20%        |
|            |                                | = Rp. 1.006.080,-                    |
| Contoh V   | : Kelompok 5                   | = Pengambilan Air Tanah 1-50         |
|            | Volume pengambilan Air Tanah   | = 20 M3                              |
|            | Nilai Perolehan Air Tanah      | = Rp. 11.032,-                       |
|            | Tarif Pajak Air Tanah          | = 20 %                               |
|            | Besar Pajak Air Tanah Terutang | = VPAT x NPAT x Tarif PAT            |
|            |                                | = 20 M3 x Rp. 11.032,- x 20%         |
|            |                                | = Rp. 44.128,-                       |

**BUPATI SIAK,**

**AFNI. Z**